



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3.Peraturan/2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT/3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/ 146 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA
 TENGAH TAHUN 2025

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		Penjelasan	Ket.		
1.	Peraturan Gubernur	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari APBD		✓			✓		BPKAD	2025
2.	Peraturan Gubernur	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026	✓ Rencana Kerja	✓		01 Januari s/d Desember 2025	✓		- Bapperida; - Biro Hukum	2025
3.	Peraturan Gubernur	ORTA UPT Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	✓ Tugas dan Fungsi UPT	✓		Maret s/d April 2025	✓		- Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan; - Biro Hukum; dan - Biro ORTA.	Bulan April 2025
4.	Peraturan Gubernur	Grand Design Pembangunan Kependudukan	✓ Grand Design Pembangunan Kependudukan	✓			✓		- DPR PT; - MRP PPT; - Seluruh PD	2025

5.	Peraturan Gubernur	Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; ✓ Kode Etik; ✓ Komite Etik; ✓ Pemeriksaan dan Keputusan; dan ✓ Pembiayaan 	✓		01 Januari s/d Desember 2025	✓		- Seluruh PD	2025
6.	Peraturan Gubernur	Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 			01 Januari s/d Desember 2025	✓		- Seluruh PD	2025
7.	Peraturan Gubernur	Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Brigade Alsintan; ✓ Susunan dan Struktur Organisasi; ✓ Peran dan Tugas Brigade; ✓ Mekanisme; ✓ Kerjasama; ✓ Pengelolaan; ✓ Pembiayaan; ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 	✓		01 Januari s/d Desember 2025	✓		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan; - Biro Hukum. 	2025
8.	Peraturan Gubernur	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota MRP-PPT	—	✓		01 Januari s/d Desember 2025	✓		<ul style="list-style-type: none"> - MRP-PPT - Biro Hukum 	2025
9.	Peraturan Gubernur	Ijin Mengambil Sumber Daya Alam	—	✓		01 Januari s/d Desember 2025	✓		<ul style="list-style-type: none"> - MRP-PPT - Biro Hukum 	2025
10.	Peraturan Gubernur	Tata Naskah Dinas di Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; 	✓		April s/d Desember 2025	✓		<ul style="list-style-type: none"> - Biro Organisasi; - Biro hukum. 	2025

		Provinsi Papua Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Naskah Dinas; ✓ Pengamanan Naskah Dinas; ✓ Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; ✓ Pengendalian Naskah Dinas; 							
11.	Peraturan Gubernur	Pakaian Dinas ASN		✓		April s/d Desember 2025	✓		- Biro Organisasi	2025
12.	Peraturan Gubernur	Pedoman SOP		✓		April s/d Desember 2025	✓		- Biro Organisasi	2025
13.	Peraturan Gubernur	Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan		✓		April s/d Desember 2025	✓		- DPMPSTSP	2025
14.	Peraturan Gubernur	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah		✓		Juni s/d Desember 2025	✓		- Seluruh PD - Biro Organisasi - Biro Hukum	2025
15.	Peraturan Gubernur	Pemberian Keringanan Penetapan Secara Bertahap Atas Pajak Kendaraan Bermotor Terutang		✓		Juni s/d Desember 2025	✓		- BPKAD - Biro Hukum	2025

16.	Peraturan Gubernur	Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Pajak Dan Apresiasi Kepada Pembayar Pajak kendaraan Bermotor Tepat Waktu	✓		Juni s/d Desember 2025	✓		- BPKAD - Biro Hukum	2025
-----	--------------------	---	---	--	------------------------	---	--	-------------------------	------

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002